



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN CIPTA KARYA DAN DIRJEN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 28 Juni 2022
Waktu : Pukul 14.00 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Roberth Rouw (F-P.NASDEM) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
- Acara :
1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Mei 2022;
2. Membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA 2023 masing-masing Unit Eselon I
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
42 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
8 dari 11 orang Anggota
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
3. Mochamad Herviano
4. Sukur H. Nababan, S.T.
5. Ir. Sudjadi
6. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
7. H. Irmadi Lubis
8. Harvey B. Malaihollo
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
6 dari 8 orang Anggota
1. Ir. Ridwan Bae
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

5. Muhammad Fauzi, S.E.
6. Ir. H. Anang Susanto, M.Si.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)

4 dari 7 orang Anggota

1. Ir. Sumail Abdullah
2. Sudewo, S.T., M.T.
3. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
4. Drs. H. Mulyadi, M.MA.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

5 dari 6 orang Anggota

1. Roberth Rouw
2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
3. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
4. Drs. H. Soehartono, M.Si.
5. Sri Wahyuni

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)

5 dari 6 orang Anggota

1. H. Ruslan M. Daud
2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
4. Sofyan Ali, S.H.
5. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
2. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
3. Lasmi Indaryani, S.E.
4. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)

4 dari 5 orang Anggota

1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
3. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
4. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)

5 dari 5 orang Anggota

1. H.A. Bakri H. M., S.E.
2. Athari Ghauthi Ardi

3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
4. H. Boyman Harun, S.H.
5. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI (Ir. Diana Kusumastuti, M.T.)
2. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR RI (Iwan Suprijanto, S.T., M.T.)

JALANNYA RAPAT:

**KETUA RAPAT/ F-P.NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA
KOMISI V DPR RI:**

Kita boleh mulai ya teman-teman.
Baik.

Bapak-Ibu Anggota Komisi V, yang saya hormati.

Kita mulai sekarang ya, saya buka ya.

Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan topik acara pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2022. Pembahasan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L Tahun Anggaran 2023 masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI
Yang terhormat, Saudara Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh
jajarannya,
Serta para hadirin yang kami muliakan,

Rapat ini dapat kami buka karena sudah dihadiri oleh 33 orang, secara, 17 secara fisik dan 16 orang secara virtual dari jumlah Fraksi, 9 Fraksi, yang hadir. Mengawali Rapat Dengar Pendapat hari ini marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat wal'afiat baik secara fisik maupun secara virtual dari tempat kita masing-masing.

Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan pergantian sementara Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat Saudara H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., Nomor Anggota 541 Daerah Pemilihan Jabar IV menggantikan Saudara Willem Wandik, pindah ke Komisi II.

Hadir? Oh nggak hadir. Ada virtual? Tidak ada. Baik kita lanjut.

Menurut laporan dari Sekretariat daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak, tadi saya sudah sampaikan 17 orang secara fisik yang sudah ditandatangani dan 16 orang secara virtual terdiri dari 9 Fraksi. Maka rapat ini sudah kuorum.

Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah saya membuka Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami dan juga telah hadir secara virtual kepada, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Seluruh Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

Pimpinan dan Anggota Komisi V, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR pada hari Kamis, tanggal 9 Juni yang lalu telah disepakati beberapa hal di antaranya:

Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Kementerian PUPR adalah sebesar 98 Triliun 207 Miliar, dari alokasi pagu anggaran. Pagu Indikatif tersebut alokasi anggaran untuk Dirjen Cipta Karya adalah sebesar 14,255 Triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan antara lain pembangunan dan perluasan SPAM, pembangunan rehabilitasi dan renovasi, sarana prasarana pendidikan, pengadaan kawasan strategis pariwisata nasional, dan dukungan terhadap program padat karya.

Selanjutnya, Dirjen Perumahan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp5,938 Triliun, yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, dan bantuan perumahan swadaya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin

menegaskan kembali agar dalam proses penyusunan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023 benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam seluruh rangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat sampai dengan hari ini.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Demikianlah pengantar dari kami, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR untuk menyampaikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai rencana kerja dan anggaran masing-masing unit organisasinya pada Tahun Anggaran 2023. Kami persilakan dari Dirjen Cipta Karya.

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Bismillahirrahmanirahim.

Terima kasih, Bapak.

**Yang saya hormati, Pimpinan Komisi V DPR RI, dan juga
Para Anggota Komisi V DPR RI, serta
Bapak Dirjen Perumahan, dan juga
Para Kepala Balai Perumahan dan juga PPW seluruh Indonesia.**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
**Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,**

Mohon izin, Bapak, sebelum kami menyampaikan paparan, ada dua hal yang kami sampaikan yaitu: Evaluasi terkait dengan kegiatan kami 2022 sesuai dengan undangan dan juga 2023. Kami mohon izin, untuk memperkenalkan terlebih dahulu karena kami ada perubahan, Pak, di Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang pertama adalah Direktur Sanitasi yaitu Bapak Tanusisusilase. Pak Anes, ini Pak Anes iya panggilannya, Pak. Dan, juga Direktur Kepatuhan Intern ya, ini Bapak Untoro. Ini ada perubahan kami, Pak, ada dua Direktur yang berubah.

Mohon izin kami lanjutkan. Pertama adalah masalah evaluasi pelaksanaan APBN Dirjen Cipta Karya Tahun 2022. Pagu untuk Cipta Karya 2022 itu adalah Rp14,18 Triliun, ini terdiri dari Rupiah Murni Rp11,2 dan juga PHLN Rp2,98 Triliun. Dan, kami ada penambahan pagu terhadap DIPA awal Tahun 2022 yakni adalah akibat adanya tambahan anggaran untuk dukungan Presidensi G20 dan juga *event* Internasional sesuai dengan Perpres 116 Tahun 2021. Ya, ini ada sebesar 1,135 Miliar, ya, 1,1 Triliun dan juga adanya tambahan percepatan untuk PHLN, Pak, sebesar 445 Miliar.

Kemudian, progres serapan keuangan kami saat ini mengacu pada data *e-monitoring*, itu adalah sebesar 29,20%, ya. Tadi, Pak, siang sudah 29,50%, kalau kita lihat Kementerian PUPR juga sudah 29 juga tapi *alhamdulillah* kami masih di atas PUPR, ya. Adapaun capaian fisik kami adalah 31,29% sedangkan kegiatan Padat Karya sampai dengan akhir bulan Juni ini angka serapan keuangannya ini mengacu pada data *e-monitoring* adalah sebesar 2,71%, Pak, ya, 2,71% dan progres fisiknya masih kecil 0,51 karena kemarin kami baru selesai untuk melakukan revisi dan juga SK-nya sudah ditetapkan dan baru kita mulai bulan-bulan Juni ini. Dan, saat ini sudah dilakukan persiapan antara lain *rekrutmen* untuk tenaga fasilitator dan juga koordinasi dengan daerah.

Dan, Tahun 2022 ini Cipta Karya juga ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan strategis untuk pelaksanaan G20 dan juga dukungan *event* Internasional, ya, untuk dan progresnya mungkin bisa kami sampaikan. Untuk Taman Mini alokasinya 891 Miliar, detail progress rata-rata keuangannya 41,84% dan fisiknya 59,17%, ya, dan semuanya akan selesai harus selesai di Juli 2022 ini. Kemudian VVIP di Bandara Ngurah Rai ini juga 52 Miliar, progres fisiknya 53,97% dan Agustus harus selesai.

Mangrove di Bali ini juga harus selesai di bulan Juli. Progresnya keuangan 15% sedangkan fisiknya 50,55%. Kemudian, di Mandalika kami juga sudah menyelesaikan 70,15% fisiknya sedangkan keuangannya baru 61,75%. Kemudian, untuk yang di Rinca, di Rinca ini kami baru selesai 19,31% dan kami harapkan nanti kami upayakan Agustus 2022 ini juga sudah selesai.

Tahun 2022 ini Cipta Karya juga ditugaskan untuk menuntaskan rehab-rekon, Pak, pasca bencana baik yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, NTT, NTB, Lumajang, dan kemarin juga ada tambahan lagi untuk Timor Timur ya, Pak, ya bekas pengungsian Timor Timur, Timor Leste. Untuk bencana di Sulawesi Tengah saat ini progresnya Hantap di Pombewe juga sudah 100%. Kemudian Sulawesi Barat ini juga salah satu yang kita tangani, Kantor Bupati Mamuju, ya, itu juga sudah 100%. Kemudian juga Badai Siklon Seroja di NTT maupun NTB kami juga sudah bersama-sama dengan Perumahan kami menyediakan infrastruktur permukimannya untuk mendukung relokasi salah satunya di Desa Nelelamadike itu di NTT juga ya dan juga di Desa Daha Kabupaten Dompu. Ini keduanya juga sudah selesai untuk kita tangani.

Dan, terakhir kami juga kemarin menangani untuk di Lumajang Semeru ini juga saat ini prosesnya juga sudah hampir selesai.

Selanjutnya, kami akan menyampaikan untuk rencana Alokasi Direktorat Jenderal Cipta Karya di Tahun 2023. Perlu kami sampaikan Bapak bahwa, Bapak-Ibu sekalian bahwa usulan Pagu Indikatif Tahun 2023 ini sesuai dengan Surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan dan juga Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 5 April 2022 itu adalah sebesar Rp22 Triliun. Ini terbagi menjadi pertama adalah program dukungan manajemen dalam rangka operasional dan juga Kesatkeran ini sebesar 1,05 Triliun. Kemudian juga Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ini sebesar 21 Triliun yakni

terdiri dari fungsi pemukiman, pemukiman ini sebesar 17,22 Triliun dan juga fungsi pendidikan ini sebesar 3,78 Triliun.

Adapun berdasarkan surat bersama, Pagu Indikatif Tahun 2023 tanggal 18 April, Pagu Indikatif Dirjen Cipta Karya itu dialokasikan sebesar Rp14,25 Triliun, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Sedangkan alokasinya ini terbagi menjadi Dukungan Manajemen dalam rangka operasional dan kesatkeran itu sebesar 0,94 Triliun sedangkan untuk Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu sebesar 13,31 Triliun. *Nah*, ini terbagi menjadi dua fungsi ya, fungsi permukiman sebesar 10,25 Triliun sedangkan untuk fungsi pendidikan ini sebesar 3,06 Triliun.

Dan, Bapak-Ibu sekalian sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Direktorat Jenderal Cipta Karya ini diarahkan untuk mendukung prioritas nasional satu yaitu untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, ini untuk dukungan KSPN dan rehabilitasi pasar. Kemudian, prioritas nasional dua, ini dalam rangka untuk mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan juga menjamin pemerataan. Ini antara lain untuk penanganan kawasan permukiman. Kemudian prioritas yang ketiga ini antara lain untuk ini dalam rangka untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan juga pelayanan dasar. Ini untuk penanganan air minum, air limbah, dan juga untuk persampahan.

Sedangkan prioritas enam ini dalam rangka untuk membangun lingkungan hidup ini untuk meningkatkan ketahanan bencana dan juga perubahan iklim, ini dalam rangka untuk kita melakukan penanganan kawasan rawan bencana. Kemudian prioritas yang ketujuh, prioritas nasional yang ketujuh, ini dalam rangka untuk memperkuat stabilitas Polhukam dan juga transformasi pelayanan publik. Ini antara lain kami lakukan untuk PLBN, ya.

Nah, pada Tahun 2023 ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Menteri pada saat Raker, prioritas utama program Kementerian PUPR adalah yang pertama adalah untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan *multiyears contract*. *Nah*, *multiyears contract* ini lanjutan dan juga *multiyears* baru pada Tahun 2022, ini termasuk untuk fungsi pendidikan dan juga direktif penugasan khusus termasuk kunker yang *rediness* kriterianya siap dan bisa selesai di Tahun 2023. Serta tentunya kami juga melaksanakan *committed project*, ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri juga kami laksanakan dengan bentuk OPOR, ya, dengan bentuk OPOR.

Nah, kemudian pembayaran hutang pekerjaan berupa tunggakan yang telah diaudit dan juga untuk siap bayar, kami juga nanti harus ada di 2023. Kemudian, rehabilitasi untuk rekonstruksi bencana alam. *Nah*, ini kami melaksanakan untuk lanjutan penanganan rehab rekon di Sulawesi Barat yang akan kita lelangkan secara reguler di Tahun 2022, ini rehab-rekon untuk bentuk Masjid Syuhada ya.

Kemudian juga dukungan mobilisasi untuk perawatan tanggap darurat. Kemudian pembayaran eskalasi untuk Dirjen Cipta Karya, ini tidak ada kebutuhan juga mungkin nanti program padat karya yang terakhir ini kami melakukan untuk infrastruktur yang berbasis masyarakat seperti PAMSIMAS, SANIMAS, PISEW, dan juga KOTAKU, serta tambahan untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat secara struktur pohon anggaran, untuk Pagu Indikatif kami sebesar 14,25 Triliun, ini dapat dijelaskan sebagai berikut, ya. Pertama adalah dukungan manajemen, dukungan manajemen ini sebesar 0,94 Triliun ini digunakan untuk pemenuhan wajib terhadap untuk gaji tunjangan dan juga operasional kesatkeran.

Kemudian, ada program Perumahan Permukiman, kalau kita lihat di sini 13,31 Triliun. Ini ada dua terdiri dari atas rupiah murni 11,02 Triliun dan juga untuk PHLN 2,29 Triliun, ya. *Nah*, untuk yang Rp11,02 Triliun ini untuk rupiah murni ini terdiri dari anggaran pendidikan sebesar 2,89 Triliun, ini termasuk dengan kegiatan-kegiatan kami yang *multiyears contract*, ya, untuk fungsi pendidikan.

Kemudian, kegiatan optimalisasi aset ini OPOR untuk sistem penyediaan air minum dan juga TPA sebesar Rp0,14 Triliun. Kemudian, tanggap darurat ini untuk mobilisasi peralatan darurat ini sebesar Rp0,06 Triliun. Kemudian, kegiatan dengan skema SBSN, kami baru pertama kali Bapak untuk yang Jatiluhur ini sebesar 0,48 Triliun. Kemudian, kegiatan yang infrastruktur berbasis masyarakat sebesar Rp2,45 Triliun, ini terdiri dari BLM sebesar Rp0,11 Triliun dan juga *safeguarding* Rp0,34 Triliun, ya.

Kemudian, untuk penanganan kegiatan direktif, penugasan ya, dan juga pembunuhan RPJM ini sebesar Rp4,98 Triliun, ya. *Nah*, ini kalau perlu kami sampaikan Rp3,69 Triliun nya merupakan paket kontrak tahun jamak MYC dan sisanya nanti kita lakukan dengan SYC, ya, Rp1,29 Triliun. Dan, kami tentunya yang sudah siap RC-nya nanti kami akan lakukan dengan lelang dini.

Bapak-Ibu sekalian, untuk alokasi Pagu Indikatif 2023, ya, sesuai dengan program dan bidangnya kami bagi. Untuk program Perumahan dan Kawasan Permukiman, ini diprioritaskan untuk sektor air minum dan juga untuk sanitasi, ya. Air minum ini sebesar Rp3,54 Triliun, sanitasi Rp3,22 Triliun, kemudian, PKP ya, itu Rp1,28 Triliun, sedangkan BPB (Bina Penataan Bangunan) sebesar Rp1,61 Triliun, sedangkan untuk prasarana strategis ini sebesar Rp3,39 Triliun, ini terdiri dari fungsi pendidikan sebesar nol, *eh*, 3,06 Triliun dan juga fungsi permukiman ini sebesar 0,33 Triliun, dan lainnya ini untuk Seditjen Bimtek, KI, dan SSPIP hanya 0,27 Triliun, dan dukungan manajemen 0,94 Triliun.

Dan, ini mohon izin kalau kami boleh detailkan alokasi 3,54 Triliun untuk air minum ini terdiri dari pembangunan dan peningkatan SPAM, 2.123 liter/detik. Ini antara lain untuk pembangunan SPAM Regional Mebidang di Sumut, kemudian pembangunan SPAM di Wososukas, Jawa Tengah, pembangunan Mamminasata juga yang di KIT Batang, juga IPA dan jaringan

perpipaan IKK Katulampa Kabupaten, Bogor, untuk mendukung Istana Bogor, kemudian juga IPA SPAM Huntap Todo dan Duyu, di Palu, kemudian SPAM Bendung Bindang Bano, kemudian pembangunan Tarutung, Tapanuli Utara, kemudian juga SPAM Seropan, dan juga IPA di Putussibau Selatan di Kapuas Hulu.

Sedangkan untuk perluasan SPAM ini ada pembangunan jaringan transmisi untuk SPAM Jatiluhur, kemudian juga pembangunan perpipaan untuk SPAM Regional di Unggulan Jawa Timur, kemudian Semarang Barat, dan juga untuk Kaligoro Jawa Timur. Kemudian juga ada SPAM untuk 1.050 SR, ini juga untuk optimalisasi di Durolis, Riau, kemudian optimalisasi IKK Kerinci, kemudian SPAM Air Seruk, Belitung, dan juga IKK PKE, ya, di Kabupaten Baru, kemudian Kaimana dan juga Airbangis, dan Kapalang, ya.

Kemudian untuk sanitasi, ya, sanitasi ini untuk air limbah untuk 15.250 KK ini ada di Jakarta *Sewerage*, Pekanbaru, kemudian Jambi, dan juga Aceh serta untuk IPLT Duri di Bengkalis, serta IPLT Maros di Palopo, dan juga pembangunan IPLT Jugil, ya.

Kemudian, untuk pengelolaan persampahan, persampahan ini ada pembangunan di TPA Samosir, Regional di Manado, ya, kemudian Bitung, dan *Solid Waste* yang ada di Metro Bandung, dan juga TPA Junjutan, ya, serta TPA Ijobalit di Lombok Timur, di Keerom, dan juga TPA di Keerom.

Kemudian, Rp1,28 Triliun untuk PKP, ya, PKP ini ada untuk permukiman kumuh ini kita tangani 30 hektar untuk peremajaan di Kedawung, Tangerang, juga untuk di Muna. Kemudian, untuk KSPN untuk kegiatan lainnya ada *Waterfront* di Tele Pangururan, Bromo Tengger Semeru, kemudian di wisata Toraja, Borobudur ini masih ada, Wakatobi dan juga di Gajah Mungkur, Wonogiri, serta *waterfront* Kapuas Hulu, dan penataan Huta Baning.

Kemudian, BPB ini ada beberapa terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung, ini mungkin terkait dengan TSTH yang ada di Sumatera Utara, kemudian juga Papua *Youth Creative Hub*, kemudian Rumah Sakit Anutapura di Sulawesi Tengah, dan juga untuk *community health center* di Tondo, Talise, dan Pombewe, ya.

Kemudian, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan ini ada penyelesaian untuk yang pembangunan *Bike Park* di Meninting NTB, PLBN-PLBN yang belum selesai, Kota Lasem, ya, Benteng Pendem Ngawi, kemudian juga Rumah Benteng Nusa, dan penataan kawasan di Sumberejo Ngablak, ya, Pura Bekasi, dan juga Balikpapan.

Kemudian, 3,06 Triliun ini untuk prasarana strategis ini untuk pelaksanaan sekolah madrasah di seluruh Indonesia ada 979 dan termasuk juga untuk renovasi SMA Taruna Nusantara. Kemudian, Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ini juga ada beberapa yang sudah masuk dan ini merupakan sebagian besar adalah MYC lanjutan, ya, untuk UGM, UNU ya, Universitas Padang, Haluoleo, kemudian IAIN Metro, kemudian juga di UIN Banjarmasin, dan juga Bangkalan di Taruna.

Kemudian, untuk kegiatan renovasi pasar ini dengan alokasi 0,33 Triliun termasuk Pasar Gede Klaten, Thumburuni di Fak-Fak, kemudian Batu, Tempe, Pasar Tempe Sengkang, dan juga Pasar Tanjung Pinang, serta Pasar Baros Serang, yang ada, dan juga Pasar Raya Padang, dan juga Pasar Kolpajung.

Kemudian, kami juga masih melakukan pembangunan *Indoor Multifunction Stadium* yang ada di GBK, ya.

Kemudian, terakhir rencana untuk infrastruktur yang berbasis masyarakat Tahun 2023. Kami sesuai dengan paparan Bapak Menteri, kemarin adalah sebesar 2,11 Triliun. 2,11 Triliun ini untuk tenaga kerja 62.000 orang ini ada untuk PAMSIMAS sebesar 690 Miliar untuk 1.725 Desa, SANIMAS 578 Miliar itu untuk 1.156 lokasi, sedangkan, untuk sarana pendidikan keagamaan sebesar 290 Miliar ini untuk 1.381 lokasi, TPS3R itu untuk 106 lokasi, enam ratus, *eh*, 63,6 Miliar KOTAKU, untuk 265 kelurahan alokasinya sebesar 198 Miliar, kemudian PISEW 450 kecamatan dengan alokasi sebesar 225 Miliar, dan yang terakhir adalah penanganan kemiskinan ekstrem. Penanganan kemiskinan ekstrem ini sesuai dengan BKKBN sebesar 66 Miliar ini kebutuhannya untuk 30 lokasi.

Dan, berdasarkan dari hasil evaluasi kami untuk persiapan rencana kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat di Tahun 2022, maka untuk di Tahun 2023 kami akan memulai seluruh persiapan ini lebih awal, ya dan kami mohon usulan-usulan dari Bapak-Ibu sekalian, ini bisa kami terima di bulan September 2022. Dan, kami harapkan nanti ini kita bisa selesai di akhir tahun dan sudah bisa langsung masuk ke dalam DIPA sehingga di bulan Januari kami sudah bisa langsung melaksanakan bila DIPA itu sudah terbit. *Nah*, ini kami harapkan ini nanti bisa selesai lebih cepat di pertengahan Tahun 2023 bila semuanya sudah selesai di 2022.

Mungkin demikian, Bapak, yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf terima kasih dan.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, lanjut.

F-P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Pimpinan, saya interupsi sebentar. Ini saya mengingatkan saja karena Pimpinan tadi memimpin rapat, ya, *toh* jadi terserah. Dirjen Cipta Karya kan sudah membacakan ini, tuntaskan dulu ini dari apa yang di bicarakan tadi. Contoh saya ambil contoh, ya dia tidak salah PISEW 450. Pada apa kalian tadi bicarakan? Sehingga oleh karena itu ya mohon maaf ya *toh* bahwa dari pada Raker kita sudah mulai ketok 98 sekian Triliun Kementerian PU, Dirjen A sekian, Dirjen B sekian, Dirjen C sekian, dan seterusnya. Artinya apa? Itu sudah *clear* diketok sehingga kita sekarang membahas antar Dirjen. Sekarang Dirjen

Cipta Karya, dari apa yang kalian bicarakan. Contoh, PISEW tadi kalau tidak salah berapa tadi, beliau masih mengatakan 453, titik. Artinya kalau memang itu saya kasih tahu satu-satu tuntaskan baru masuk ke Dirjen Perumahan. Kalau tadi langsung ke Dirjen Perumahan seolah-olah ini tidak ada, apa yang kalian bicarakan tadi. Itu maksud saya terserah, ya. Jadi tuntas satu satu di situlah mekanisme rumahnya, apakah sudah disepakati tidak lagi bicara usulan. Kalau usulan bisa diterima bisa tidak. Tapi apa yang sudah disepakati, kalian bilang tadi sudah sepakat, itulah yang menjadi pedoman yang untuk diketok per-Dirjen, per-Dirjen, baru nanti bikin kesimpulan.

Demikian, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Dewo, ada tanggapan?

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Saya kira dengan dibuat model seperti itu, itu nggak ada bedanya apabila nanti kita beri kesempatan terlebih dulu kepada Dirjen Perumahan baru kita tuntaskan. Tapi kalau memang mau dibuat model sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jhonni Allen, ada baiknya juga. Kita ketok saja Cipta Karya kemudian nanti pada saat Perumahan memberikan penjelasan akhir daripada penjelasan saatnya kita tidak perlu bertele-tele juga menanggapi kita langsung ketok juga nggak masalah. Tapi, kalau memang mengalir mau sesuai dengan rapat seperti biasanya, ya, itu juga akan lebih baik karena ada hal-hal yang strategis mungkin akan ada yang akan disampaikan oleh kawan-kawan. Hanya saya menghimbau, saya hanya bisanya mengimbau tidak karena menghimbau diri saya sendiri juga supaya nanti tidak terlalu panjang karena waktu sudah terlalu sore.

Saya kira itu.

KETUA RAPAT:

Iya, saya kira teman-teman sekalian kita sepakat tadi apa yang kita sepakati tadi, ya, itu artinya juga belum bisa kita masukin di dalam pembahasan kita pada hari ini karena itu nanti akan dibawa laporkan kepada Bapak Menteri pada pertemuan nanti, ya. Jadi, ada usulan nanti kita ini kan belum kita setuju dan sepakati, ini baru pembahasan awal kita usulan-usulan Pemerintah, ya kan. Apa yang tadi dibacakan itukan baru usulan, nanti keputusannya itu akan kita ambil kesimpulan *gitu*.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B KADY, M.S.):

Izin, Ketua

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B KADY, M.S.):

Terima kasih.

Nanti pada akhir pembicaraan kita kan ada kesimpulan, kesimpulan itu saran dan masukan Anggota yang termasuk yang kita bicarakan. Itu akan menjadi perhatian dalam keputusan rapat kita pada hari ini, itu kan *rutinisme* seperti itu. Dengan itu saya kira itu sudah cukup ya, kita tidak usah persoalkan itu. Biarkanlah jalan ini dan kita ambil kesimpulan, *and toh* nanti kesimpulan kita pasti masukan dan arahan dari kita itu yang menjadi dasar keputusan selanjutnya.

Ya saya kira demikian, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya jadi lanjut saja Pak Dirjen Perumahan, silakan.

DIRJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. IWAN SUPRIJANTO, ST.MT):

Baik terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati, Bapak Ketua Komisi V,
Yang saya hormati pula para Pimpinan Komisi V beserta seluruh Anggota,
Yang saya hormati pula Ibu Dirjen Cipta Karya beserta seluruh jajaran,
Yang saya banggakan teman-teman dari Direktorat Jenderal Perumahan
dan Para hadirin yang baik hadir secara fisik di ruangan ini maupun
secara virtual,**

***Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Salam sehat untuk kita semua,***

Mohon izin, sebelum menyampaikan paparan ini saya juga melaporkan bahwa kami hadir bersama seluruh jajaran pejabat tinggi Pratama di lingkungan Dirjen Perumahan beserta seluruh Kepala Balai yang hadir secara virtual. Dan pada kesempatan ini saya juga menginformasikan adanya pergantian Kepala Balai yaitu pada Kepala Balai P2P Sumatera II dari Bapak Rusli, ST, MT, kepada Bapak Iswanto. Tapi kebetulan Pak Iswanto tidak bisa hadir karena sedang menunaikan ibadah haji.

Bapak-Ibu sekalian, mohon izin untuk melanjutkan pada paparan yang ingin kami sampaikan. Ada dua hal utama yang ingin kami sampaikan terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Prioritas Program Tahun Anggaran 2023.

Pertama, kami sampaikan bahwa total Pagu Anggaran Ditjen Perumahan Tahun Anggaran 2022 saat ini adalah 6,9 Triliun dengan adanya tambahan 1,8 Triliun ini percepatan atau *top up loan* untuk kegiatan NAHP dan ini sebesar 1,77 Triliun dan NSUP untuk penanganan Sulawesi Tengah sebesar 36,32 Miliar dari pagu awal sebesar 5,1 Triliun. Perlu kami sampaikan bahwa pagu total blokir ya ini ada 400 Miliar mayoritas ada di *loan* termasuk ada 110 Miliar untuk *automatic adjustment* yang pertama, ini belum termasuk yang kedua.

Bapak-Ibu sekalian, perlu kami sampaikan dan kami laporkan bahwa di awal pelaksanaan Tahun 2022 kami telah melakukan evaluasi anggaran melalui efisiensi belanja anggaran terutama dukungan manajemen guna menambah *output* dan memenuhi kesepakatan antar Pimpinan, terkait dengan alokasi kegiatan padat karya, ya, khususnya untuk menampung aspirasi Bapak-Ibu sekalian supaya bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antar Pimpinan.

Kami laporkan bahwa progres fisik dan keuangan dari Direktorat Jenderal Perumahan sampai dengan hari ini adalah 38, mungkin ini sudah berbeda dengan yang di, Bapak-Ibu terima tetapi *real time* adalah 38,1% dan secara fisik 33,41% ini lebih tinggi dari progres Kementerian PUPR, ya. Jadi mungkin ini data yang ditampilkan masih yang pagi, ya, tapi per hari ini sudah 38,1% untuk keuangan dan 33,41% untuk fisik. Kemudian, kami juga sampaikan untuk kontraktual ini secara keseluruhan sudah terkontrak dan sedang progres lelang, ya, walaupun ada yang belum lelang adalah paket IKN yang secara anggaran sampai dengan saat ini belum teralokasi anggarannya dan tidak termasuk di dalam pagu ini.

Mohon izin Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota, kami ingin menyampaikan evaluasi dari program Tahun 2022 ini bahwa masih terdapat usulan-usulan, ini mohon perhatian dari aspirasinya. Untuk Rusun, ya, yang belum sepenuhnya memenuhi *readiness criteria* dan untuk BSPS masih ada perubahan-perubahan usulan calon penerima bantuan dari alokasi 103.000 unit, jadi yang sudah kami SK kan ini kami SK kan secara bertahap sampai dengan tahap ke-8 saat ini baru 89.011 unit, ya, yang sudah. Jadi ini mohon percepatan agar pelaksanaan dapat segera kami laksanakan.

Ini untuk progres 2022 dan mungkin sekilas, kami sampaikan juga mengenai progres-progresnya, mungkin bisa diperlihatkan. Lanjut, ini untuk yang BSPS tadi. Lanjut, ada beberapa pekerjaan di lapangan yang sudah kita selesaikan.

Kemudian, mungkin untuk mempersingkat waktu saya masuk saja ke Rencana Program Tahun Anggaran 2023. Isu strategis yang ada di 2023 terkait dengan sektor perumahan, ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan Tematik dan Direktif Nasional Tahun 2023, penyelesaian kegiatan OPOR, pemeliharaan, dan rehabilitasi, kemudian penanganan kemiskinan ekstrem dan *stunting*, kemudian keterpaduan penanganan kawasan.

Sebagaimana prioritas utama pada program Kementerian PUPR Tahun 2023 prioritas penanganan Ditjen Perumahan ini meliputi:

Yang pertama adalah, antisipasi kegiatan yang diusulkan menjadi kegiatan MYC. Jadi ini pemenuhan terhadap kegiatan tersebut. Kemudian, identifikasi kegiatan prioritas termasuk OPOR Tahun 2023, Direktif Presiden dan Direktif Menteri PUPR, kemudian penanganan bencana, aspirasi dan hasil kunjungan kerja dari Bapak-Ibu sekalian, kemudian, penanganan kemiskinan ekstrem, pembangunan Ibukota Negara IKN, dan kegiatan baru yang bersifat prioritas

Walaupun secara alokasi anggaran selanjutnya kami sampaikan bahwa Pagu Indikatif Tahun 2023. Usulan kebutuhan Pagu Tahun 2023 Ditjen Perumahan adalah 8,7 Triliun tapi alokasi Pagu Indikatif berdasarkan dari 98 Triliun anggaran Kementerian PUPR alokasi Pagu Indikatif untuk Ditjen Perumahan adalah 5,938 Triliun, dengan rincian tadi berdasarkan prioritas yang kami sampaikan tadi. Kelompok pertama adalah kelompok yang *committed* adalah 1,2 Triliun atau 20,21%, ini untuk mendanai kegiatan yang bersifat MYC ini sekitar 547 Miliar atau 9,2%.

Kemudian, untuk OPOR, ya, ini seluruh infrastruktur yang pernah kami bangun dan kita pastikan bahwa Tahun 2024 akan termanfaatkan ini sebesar 134 Miliar atau 2,25%.

Kemudian dukungan penyelenggaraan perumahan khususnya dukungan manajemen ini 519 Miliar atau 8,75% ini di mana termasuk gaji, belanja operasional, dan non operasional, ya.

Kemudian yang cukup besar adalah untuk kegiatan prioritas nasional dan direktif, ini ada 4,331 Triliun atau 72,93%. Pertama untuk Direktif Presiden dan Direktif Menteri adalah sebesar 1,133 Triliun atau 19,09%. Penanganan bencana 88 Miliar atau 1,47%, *nah*, ini perlu kami sampaikan untuk aspirasi adalah 3,11 Triliun atau 52,37%. Jadi, kalau dibandingkan dengan Tahun 2021 yang 47,03%, di Tahun 2023 ini akan naik menjadi 52,37%.

Untuk penanganan kemiskinan ekstrem Ibukota Negara dan sebagainya dengan keterbatasan alokasi anggaran ini belum teralokasi, Pak. Sedangkan untuk kegiatan prioritas baru ada 407 Miliar atau 6,86%, iya ini untuk kegiatan PSU untuk rumah umum, jadi sebenarnya ini kami juga punya tanggung jawab untuk mendorong pembangunan perumahan yang tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR tetapi untuk sektor swasta dan sebagainya ini sebagai program insentif ini sebesar empat ratus koma, 407 Miliar.

Distribusi persektor perlu kami sampaikan untuk pembangunan rumah susun adalah 1,887 Triliun ini untuk pembangunan 83 *Tower* atau 3.240 unit, ini termasuk anggaran kegiatan MYC 2022-2023 dan program OPOR. Ini harus kita selesaikan dari 300-an rumah susun yang lalu, ada 83 yang akan kita lanjutkan. Di sini 66 *tower* di antaranya ini merupakan usulan dari aspirasi.

Kemudian, yang kedua adalah pembangunan rumah khusus, pembangunan rumah khusus ini hanya untuk penanganan bencana terutama yang di Sulawesi Tengah jumlahnya 2.484 di dalamnya ada *loan* CSRRP ini untuk penanganan lanjutan pembangunan Huntap yang ada di Sulawesi Tengah, kegiatan OPOR, dan tadi sebagaimana disampaikan Bu Dirjen Cipta Karya kami juga masih melanjutkan untuk bencana yang di Lebak banjir bandang yang di Lebak, kemudian penanganan *ex-pengungsi* Tim-Tim ini baru akan kita mulai dan akan kita selesaikan juga di Tahun 2023 dengan alokasi ini kebetulan hanya 404 Miliar. Untuk BSPS ini senilai 2,72 Triliun ini sebesar 103.000 unit dengan skema BPS ini khususnya untuk aspirasi di mana biaya tersebut termasuk biaya perencanaan, pengendalian, dan *monev*. Untuk padat karyanya sendiri dari BPS ini perlu saya laporkan nanti adalah nilai berdasarkan unit adalah dua ribu empat, *eh*, 2,45 Triliun, kalau totalnya adalah 2,721 Triliun tadi untuk 103 unit yang akan menyerap 206.000 tenaga kerja.

Nomor 4 adalah kaitan dengan bantuan PSU, rumah umum yaitu 407 Triliun untuk pembangunan rumah MBR ini sebanyak 27.825 unit dan 5 lokasi PSU jalan akses perumahan. Ini guna memastikan bahwa pembangunan rumah-rumah MBR ini terus bisa meningkat dalam rangka menyelesaikan *backlog* dan target program sejuta rumah. Sisanya adalah dukungan manajemen dan tugas lainnya ini yang hanya 519 Miliar baik itu untuk gaji, belanja operasional, dan non operasional yang lainnya.

Bapak-Ibu sekalian, mungkin lanjut ke bagian yang terakhir. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan skenario pelaksanaan Tahun 2023 dengan mempertimbangkan, ini agenda politik nasional maka kami mengusulkan pelaksanaan kegiatan Ditjen Perumahan dan tadi mungkin Bu Dirjen Cipta Karya juga mengusulkan dan kami sampaikan juga ke Pak Menteri untuk dapat kami laksanakan secara masif pada Semester I Tahun 2023 sehingga pekerjaan ini, sehingga kami berharap Tahun 2023 ini tidak ada pekerjaan yang terhambat kemudian ada yang mangkrak dan sebagainya karena tugas di Tahun 2024 memastikan infrastruktur terbangun nantinya ke arah pemanfaatan, ya.

Untuk itu Bapak-Ibu sekalian saya mohon dukungan bahwa usulan kegiatan Tahun 2023 mohon kiranya dapat sudah masuk ke kami paling lambat di bulan September 2022, agar terakomodir dalam konsep rancangan DIPA yang akan kami finalisasi pada bulan Oktober sehingga pelaksanaannya nanti tidak membutuhkan revisi lagi sehingga bisa langsung bisa dilaksanakan dan karena sudah tercantum baik besaran nilainya dan lokasinya dalam DIPA. Dan, akan kita laksanakan khususnya untuk yang rumah susun dan di luar yang belanja padat karya secara tender dini atau yang sedang kami siapkan sekarang adalah prosesnya kita percepat, kita perpendek, kita sederhanakan dengan program *e-catalog*. Jadi untuk baik itu pembangunan rumah khusus dan rumah susun desain sudah kita siapkan secara *prototyping* sehingga apabila usulan sudah bisa kami terima dan ada dalam DIPA kemudian verifikasi kita lakukan mulai dari September sampai Desember apabila memenuhi syarat tinggal klik di akhir Desember agar Januari sudah bisa dilaksanakan. Jadi ini meng-*shortcut* untuk proses tendernya kita harapkan kecuali untuk desain yang di luar desain *prototype*. Karena itu kami juga mohon bahwa seluruh usulan

tersebut mohon dipastikan agar memenuhi seluruh *readiness criteria* baik teknis maupun administrasi karena ini merupakan data pendukung kami untuk DIPA Tahun 2023.

Kemudian mungkin khusus untuk usulan ini inspirasi mohon kiranya kami akan nanti mengikuti, jadi kami memahami harapan Bapak-Ibu sekalian karena itu nanti kami harus laporkan ya Bu Diana, ya, ke Bapak Menteri PUPR beberapa usulan dan aspirasi ini. Dan, apabila kesepakatan ini sudah dibuat maka berdasarkan alokasi itu mohon kiranya bisa disepakati, kita, saya mengusulkan untuk bisa dipenuhi melalui kuota fraksi. Jadi artinya apabila terjadi perubahan atau pergantian anggota tidak mengubah kuota itu karena akan berakibat pada revisi dan perubahan-perubahan yang membuat pelaksanaan menjadi tertunda begitu.

Kemudian yang kelima apabila terdapat perubahan penerima bantuan yang disampaikan bulan September tadi, mohon kiranya kami mengusulkan dimungkinkan hanya di dalam satu provinsi yang ada sehingga tidak memerlukan revisi anggaran, bisa revisinya hanya di tingkat Kanwil dan disampaikan paling lambat adalah di akhir Desember. Karena perubahan yang di luar Dapil atau di luar harus pindah provinsi dengan risiko revisi DIPA dan keterlambatan akan berakibat pada keterlambatan pelaksanaan. Ini memang di level teknis tetapi punya implikasi terhadap pelaksanaannya karena enggak mungkin lagi ada yang MYC sampai dengan Tahun 2024.

Kemudian yang keenam, tadi dengan memperhatikan keterbatasan alokasi anggaran yang ada di kami khususnya terhadap penugasan untuk penanganan kemiskinan ekstrem kepada kami, mohon kiranya apabila berkenan maka pada Tahun 2023 mengharapkan bahwa usulan-usulan BSPS ini juga dapat kiranya mendukung atau diarahkan pada lokasi-lokasi prioritas untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Jadi ini bila memungkinkan bisa diarahkan ke sana karena ada beberapa kantong-kantong kemiskinan yang mungkin juga strategis untuk bisa didukung dengan alokasi anggaran yang ada ini.

Terkait mungkin tadi dengan arahan dan ekspektasi tadi pada prinsipnya kami akan memperhatikan hal tersebut dan akan melaporkan kepada Bapak Menteri karena tadi juga ada beberapa yang kebutuhannya harus dipenuhi mungkin harus lintas unit organisasi Bapak-Ibu sekalian karena itu pemenuhannya kami harus konsultasikan tentunya kepada Bapak Menteri terkait dengan skenario dan target-target yang harus kami capai di Tahun 2023.

Mungkin demikian Bapak-Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, sekali lagi terima kasih atas perhatian dan dukungan selama ini ya terhadap beberapa kegiatan yang telah kami lakukan.

Terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Demikian penjelasan yang telah disampaikan oleh para Dirjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya kami mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk melakukan pertanyaan dan pendalaman. Ada? Pas ya? Sepakat? Luar biasa, tepuk tangan dulu kalau *gitu*.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ini hebat benar ini, dikasih makan apa tadi, Pak.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Irwan.

KETUA RAPAT:

Nah, ini ada tapi Pak Iwan.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Iya sebentar saja. Menyerahkan. Saya mau nanya sebentar saja

KETUA RAPAT:

Iya jangan lama-lama Anggota kasihan itu yang lain.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi V
Yang saya hormati Dirjen Cipta Kerja, Dirjen Perumahan,**

PESERTA RAPAT:

Bukan cipta kerja, Cipta Karya ini.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Cipta Karya, jadi ingat Undang-Undang Cipta Kerja.

Beserta para Direktur serta rekan-rekan dari Kementerian PUPR yang saya hormati.

Eh, Untuk Ditjen Perumahan. Saya sering masuk beberapa perumahan yang dibangun swasta termasuk juga perumahan yang dibangun oleh Pak Jokowi ya. *Nah*, kalau Perumahan yang dibangun Pak Jokowi ini kan ada program untuk PSU nya *tuh*, kita bantu jalan dan lain-lainnya itu sudah banyak dilaksanakan *gitu*. Tapi saya melihat ada beberapa perumahan-perumahan lama yang dibangun oleh swasta ataupun pemerintah dulu itu jalan lingkungan perumahannya itu sudah tidak layaklah sebenarnya, tetapi tidak ada kemudian penanganan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat di situ. Saya mau tanya Pak Dirjen itu kalau perumahan yang dibangun swasta atau dibangun misalnya perumahan-perumahan ASN zaman dulu itu apakah Dirjen Perumahan juga ada anggaran untuk apa namanya, memperbaiki PSU-nya terutama jalan lingkungan perumahan itu.

Kemudian ya, untuk Ditjen Cipta Karya, saya ingatkan bahwa kemarin di Bontang ada program KOTAKU skala kawasan yang belum berlanjut, saya nanti akan sampaikan usulannya. Mungkin itu, Pimpinan, terima kasih banyak.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M.):

Izin Ketua, sedikit izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya dari sebelah kanan dulu, ya.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M.):

Iya terima kasih, Pak Ketua singkat saja. Khusus untuk Cipta Karya ini, ini amanah dari yang memberikan kepada saya mengenai SPAM Gunung Sitoli, Bu. Jadi Gunung Sitoli ini di airnya dari Gunung Sitoli tapi dialirkan ke Nias, *nah*, sedangkan di situ kekurangan air, kekurangan air. Kemarin sudah dibantu dana DAK ternyata dibatalkan karena kondisi covid jadi dibatalkan. *Nah*, persyaratannya sudah cukup semua sudah cukup karena sudah pernah dipersiapkan untuk DAK, tidak ada masalah. *Nah*, harapan masyarakat Gunung Sitoli untuk diprioritaskan karena betul-betul di sana kesulitan air sedangkan air mereka dialirkan ke Nias. *Nah*, berkas ini mau saya kasih ini, Bu.

KETUA RAPAT:

Silakan sama-sama Pak Iwan kasih dulu.

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Nanti-nanti setelah ini dulu nanti setelah ini. ya. Banyak *kali*. Iya nanti.
Iya, silakan.

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Tunggu-tunggu serahkan dulu.

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Lama *amat* nyerahinnya.

KETUA RAPAT:

Jangan nafsu. Ini difoto mau bikin kalender nanti ini.

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Baik-baik-baik. Apa lagi, Pak Syarif.

KETUA RAPAT:

Baik. Silakan, Pak Tamanuri.

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Yang saya hormati, Pak Pimpinan beserta Ketua dan Wakil Ketua serta Para rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat.

Sekarang sudah menunjukkan waktu 5 kurang 5 menit. Semua yang disampaikan oleh Ibu dan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan berdua Pak Iwan dan Pak Ishak Mekki kita cukup Bapak dan Ibu untuk dijawab secara tertulis alamatnya Kalimantan Timur dan apa, Palembang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya dari unsur Pimpinan, Pak Ridwan dulu.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pak Pimpinan Rapat.

**Pak Ketua yang saya hormati,
Teman-teman Anggota yang saya hormati,
Bu Dirjen dan Pak Dirjen beserta seluruh jajarannya,**

Saya sama Bu Dirjen Cipta Karya saja. Saya terima kasih Ibu telah *mem*, salah satu memprioritaskan penganggaran di Kabupaten Muna itu daerah kumuh KOTAKU kalau tidak salah yaitu Lagasa dan Batalaiworu. Cuma saya dengar informasi Bu Dirjen bahwa anggarannya terkurangi tentu dengan pertimbangan waktu dan seterusnya barangkali. *Nah*, kalau terkurangi saran saya Bu Dirjen mungkin diselesaikan satu-satu sebab kalau separuh-separuh tidak menyelesaikan masalah, Bu Dirjen. Jadi mungkin kalau bisa dua-duanya itu harapan saya, ya, harapan kita jawab semua dari Sulawesi Tenggara, tapi kalau tidak bisa dua-duanya karena ada pertimbangan waktu dan seterusnya maka saya minta itu satu aja dulu Lagasa misalnya, ya, nanti setelah itu baru kita anggarakan lagi yang satunya. Itu aja Bu Dirjen terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, Pak Ridwan. Kita lanjut sama Pak Ketua.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pak Roberth.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Dirjen Perumahan dan Bu Dirjen Cipta Karya dan seluruh jajarannya.**

Saya ke mekanisme terutama, Ibu, ya. Mungkin kesimpulan rapat kita nanti tidak membuat angka-angka dulu karena saya lihat yang kita dibicarakan itu berpotensi merubah pergeseran antar Direktorat Jenderal. *Nah*, jadi nanti kita mungkin kesimpulannya kami sudah coba rumuskan tadi ya supaya nanti Bapak-Bapak jangan bertanya-tanya lagi kita tidak perlu berdebat, ya. Karena kalau pergeseran antar Direktorat Jenderal tentulah bukan kewenangan Ibu dan Bapak untuk mengambil keputusan bersama kami, ya. Jadi nanti itu tidak kita muat angka-angkanya ini memang agak beda dari rapat kita yang biasa untuk menindaklanjuti apa yang tadi sudah dibicarakan, karena saya sebagai Ketua juga bertanggungjawab kepada forum rapat ini supaya semua apa yang kita putuskan betul-betul kita bisa terjemahkan dengan seluruh kesimpulan-kesimpulan rapat yang kita ambil, ya.

Kemudian, terkait mekanisme soal itu saja termasuk juga mungkin ini ngimbas ke Direktorat-Direktorat Jenderal lain besok, ya. Kita tidak akan memuat angka sampai nanti kita akan sepakati dengan Pak Menteri setelah nanti nota keuangan Pemerintah, Pak. Di nota keuangan pemerintah nanti kan

apakah ada tambah kurang tidak di Kementerian PU, ini, kalau ternyata misalnya ada pergeseran ini bisa ditutupi dari tambah kurangnya di Banggar *mana* tahu kan ada Pimpinan Banggar di sini, Pak Syarif kan ya *toh*. Ternyata nanti ada tambahan untuk PU misalnya akhirnya tidak perlu menggeser Direktorat Jenderal yang ada ya *alhamdulillah* kan *gitu*, itu yang kita harapkan, ya.

Kemudian, saya yang terakhir soal aspirasi dari daerah. Beberapa waktu yang lalu Pak Dirjen Perumahan dan Ditjen Cipta Karya di Sulawesi Utara itu ada bencana, ya, terjadinya roboh seperti likuifaksi di tepi Pantai Amurang. Besok tanggal 30, Pak, saya akan mimpin rombongan ke sana, pemerintah daerah Sulawesi Utara sudah menghibahkan lahan kurang lebih 5 hektar untuk relokasi pengungsi yang ada sekarang. Apakah ini kewenangan Cipta Karya untuk membangun rumah bagi pengungsi ini atau dari Dirjen Perumahan nanti Bapak berdua ya *hompimpa* saja *gitu* lah ya. Kemudian kalau bisa kami tolong ditemani Pak supaya nanti kita kunjungan kerja ada keputusan yang kita ambil karena kunjungan kerja itu rapat di luar kantor sebetulnya, Pak, ya, sama saja ada kesimpulan yang kita ambil. Kalau bisa tolong kami dampingi supaya nanti dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur sudah konfirmasi ke kita Pak untuk akan menerima langsung rombongan ini dan menemani rombongan ke lokasi kejadian termasuk kita akan mengunjungi pengungsi dari lokasi ini yang terkena dampak dari apa namanya dari bencana ini.

Saya rasa itu saja tambahan dari saya, Pak, terserah nanti Pak Iwan atau Ibu Diana yang akan mengutus atau siapa Direktur mungkin yang bisa mendampingi. Lebih baik mungkin salah satu dari Pak Dirjen dan Bu Dirjen mungkin bisa terbang bersama kami jauh lebih baik.

Terima kasih, Pak Ketua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi sepakat. Bukan, pertanyaan tadi nanti dijawab secara tertulis ya, kita langsung ke kesimpulan ya. Baik.

Jadi, demikian pendapat pertanyaan yang telah disampaikan oleh seluruh Anggota. Selanjutnya, kami akan membacakan kesimpulan rapat kami pada siang hari ini.

Draf Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 28 Juni 2022.

Yang pertama, terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, Komisi V DPR RI meminta Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai dengan target Tahun Anggaran 2022.

Setuju? *Nah*, setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Komisi V DPR RI sepakat dengan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR untuk menyelesaikan, menyesuaikan rincian program dan penyempurnaan RKA K/L masing-masing Eselon I dan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 secara lebih konkrit sesuai dengan saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang telah disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Sarannya? Nota Keuangannya dihilang? Kan 22 yang di atas itu belum ada *tuh*. Maunya? Saran dan usulan, pendapat.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Usulan, ya? Usulan saran dihilangkan. Boleh, lebih ini.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Tidak perlu kata dengan itu.

KETUA RAPAT:

Pendapat, usulan.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Sesuai usulan, ya udah. Terus itu Pimpinan untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA K/L masing-masing Eselon II, bukan Eselon I. Kita bicara dengan Dirjen.

KETUA RAPAT:

Eselon I, *dong*.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Kalau dengan kita ini kan berbicara dengan Eselon I, iya kan dengan Dirjen. Kalau gelondongannya Eselon I, *oke*, tapi yang akan kita geser ini kita melakukan penyesuaian ini kan yang punyanya di direktur-direktur itu gitu kan. Jadi penyesuaiannya RKA K/L itu masing-masing Eselon II, itu.

KETUA RAPAT:

Itu nanti urusan Dirjen saja, ya, sudahlah. Kita sama Dirjen tadi sudah lah, tidak usah lagi kita. Yang kita tidak ketemu jangan kita masukin di situ, yang kita ketemu Dirjennya.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Eselon II pasti nurut ke Eselon I *lah*

KETUA RAPAT:

Eselon I saja kan? Iya. *Oke?* Memang ada Eselon II yang tidak nurut ke Eselon I? Tanya Pak Dirjen, Ibu. Ada yang perlu dikoreksi?

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Mohon izin, Bapak, kalau diizinkan untuk nomor 2 mungkin sepakatnya diganti merekomendasikan gimana, Pak? Jadi Komisi V, merekomendasikan kepada Ditjen Cipta Karya dan Perumahan untuk menyesuaikan ini. Kan masih merekomendasikan, nanti kan masih ada dengan Pak Menteri, Bapak. Mohon izin, Bapak.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, Pimpinan izin, Pimpinan

KETUA RAPAT:

Iya, iya.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Saya kira tepat dengan kalimat itu, kita itu kan hanya sepakat untuk melakukan penyesuaian. Yang akan dikonsultasikan dengan Menteri itu kan jumlahnya ya kan, jadi saya kira, saya kira dengan kalimat ini sudah *pas, gitu*. Kalau kita merekomendasikan itu apa maksudnya, kita Komisi V, *kok*, membuat rekomendasi *gitukan*.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B KADY, M.S.):

Izin.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu, Iya.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Iya terima kasih.

Saya mempertegas saja karena begini. Ini kan Eselon I mendapat mandat dari Menteri untuk membicarakan sesuai dengan tugas di masing-masing Kedirjenannya, jadi saya kira tidak ada masalah, Bu. Artinya antara kan Ibu sudah mendapat pendelegasian, berkaitan nanti masalah ada setuju atau tidak itu kan domainnya Menteri. Tetapi pada saat ini Ibu adalah merupakan mandat untuk membicarakan di masing-masing Dirjen yang Ibu pimpin. Saya kira kalau kita yang merekomendasikan apa guna kita rapat pada hari ini gitu. Terima kasih

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Saya sebentar.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Ridwan.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih Pak Ketua.

Saya memahami ini pandangan Anggota, memahami juga pandangan Ibu ini, ada benarnya ini pandangan Ibu, *musti* di cermati baik-baik karena ini menyangkut Direktorat Jenderal lain.

Yang kedua tentu kehadiran juga Dirjen di sini karena keterkaitan Dirjen lain maka diperlukan konsultasi dengan Menteri gitu dan Dirjen lain itu sendiri. Jadi saya sepakat bahwa, apa, saya memahami apa yang dimaksudkan oleh Ibu Dirjen barangkali tinggal bahasanya kita sepakati kayak apa, yang penting jangan kita anggap seakan-akan bahwa Dirjen lain pun telah disetujui oleh Dirjen Cipta Karya gitu maupun Dirjen Perumahan. Ndak boleh begitu. Kira-kira seperti itu Pak, terima kasih, Pak Ketua.

F-P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik silakan, Pak Jhon.

F-P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Saya kira inikan poin 2 ini kan hanya menyangkut dua Dirjen yang hadir. Komisi V sepakat dengan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian, untuk menyesuaikan rincian program dan penyempurnaan RKA K/L daripada masing-masing Eselon. Tidak ada kita bicara Dirjen lain.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Tunggu dulu Pak Maaf, Pak ya saya interupsi boleh, Pak? Ada bahasa tadi atas usulan, sementara usulan Bapak bukan cuma itu, Pak, banyak, Pak termasuk Dirjen lain, Pak.

F-P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Bukan, tapi dalam konteks ini. Usulan ini dalam konteks dua Ditjen ini.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya tapi ini, maaf ini sudah.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Izin interupsi, Pak Ketua, interupsi

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Keterkaitan di sini, Pak, hasil pembicaraan komunikasi Bapak itu ada. *Nah*, kalau cuma ini, Pak *ndak* ada persoalan kita tetapkan hari ini sebagai angka-angka.

ANGGOTA KOMISI DPR RI:

Interupsi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bentar dulu, Pak bentar.

F-P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Saya hanya membaca ini saja. Ini hanya membaca poin 2. Ditjen Cipta Karya yang oke itu kan tadi gambaran yang tersirat di sana, tapi di sini konkret. Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan dalam konteks RKA K/L-nya. *Nah*, yang kedua mohon maaf tidak ada dalam konteks MD3 maupun dalam konteks undang-undang bahwa DPR merekomendasi, menerima, atau menyetujui menolak. Tidak ada istilah rekomendasi, itu *loh*.

Tidak ada saya tidak pernah baca kata rekomendasi di dalam undang-undang maupun di dalam. Sehingga kalimat ini menurut saya lebih kepada hanya dua Dirjen ini, itu poinnya. Tapi terserah teman-teman.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan.

F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Interupsi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Suryadi, dulu.

F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Baik terima kasih.

Pertama saya kira spirit dari suasana kebatinan Anggota Komisi V ini juga harus ditangkap oleh Bu dan Pak Dirjen sehingga kita tidak memperpanjang rapat ini. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, redaksi ini sudah sangat normatif dan yang akan dikonsultasikan kepada Pak Menteri kami setuju itu pada terjemahan dari penyesuaiannya *gitu*, jadi bukan pada apa penyempurnaannya. Dan, lampiran penyempurnaannya itu kan belum ada sekarang sehingga tidak perlu terikat takut *kok* ini Ditjen lain, Unor lain dan seterusnya tidak ada masalah. Saya kira ini sudah tepat ini karena kita belum menyepakati penyesuaiannya seperti apa, itulah yang akan dikonsultasikan oleh kepada Menteri *gitu*. Bahwa kita sepakat akan menyesuaikan iya, tapi apa angka-angka penyesuaiannya itu yang dikonsultasikan dengan Menteri dan itu sudah tersirat di sini sehingga tidak perlu dimasukkan, apa tidak perlu dirubah begitu. Saya kira begitu, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya jadi begini teman-teman.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan .

KETUA RAPAT:

Sebentar. Inilah. karena kita terlalu sekian tahun kita terpaku saja maka sekarang kita sendiri jadi bingung sendiri, ya. Saya kira ini tidak ada masalah ini, ya kan, kita tidak sebut angka-angka juga di situ, ya kan. Kita sepakat sama ini, kita berikan kesempatan kepada para Dirjen untuk berkomunikasi dulu dengan Pak Menteri, ya kan. Jadi saya kira masalah ini tidak terlalu ini.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Pimpinan. Coba saya ambil jalan tengah.

KETUA RAPAT:

Iya coba, Pak Ketua.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Jadi begini, sebentar-sebentar Ibu lagi telepon. Bu, sudah selesai? Iya silakan-silakan.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Ini kesimpulan yang sama, besok juga gitu kali ya cuma nama Dirjen saja diganti, ya. Ya kan

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Bapak Pimpinan, bisa saya.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Sebentar-sebentar, saya bisa bicara sebentar. Tunggu Ibu selesai. Ibu, sudah?

Jadi begini, jadi begini. Saya punya usul ambil garis tengah, Bu ,garis tengah dari kondisi yang sudah ada. Komisi V DPR RI sepakat dengan Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA K/L RAPBN Tahun 2023, jadi masing-masing Eselon I nya itu dibuang, ya, secara lebih konkrit sesuai usulan dan pendapat Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2023. Ini *scope*-nya ada usul kita dengan Dirjen Bina Cipta Karya dan Perumahan, namun dari pembicaraan teman-teman tadi, yang saya juga coba tanyakan kembali kepada teman-teman tadi ada kemungkinan, Bu, ya ada kemungkinan pergeseran antar Eselon I, ada kemungkinan. Oleh karenanya, karena ada kemungkinan, sementara kita tidak bisa ngambil keputusan ini bukan domainnya Pak Dirjen, ini domainnya Pak Menteri nanti kita di Raker.

Oleh karenanya, kita tidak muat angka, *nah*, biasanya kita muat angka, Pak. Pagu Indikatif Ditjen Cipta Karya sekian, Perumahan sekian, ini kita tidak muat dulu. Kita kasih ruang untuk terjadinya pergeseran antar Direktorat Jenderal, ya, nanti tentu akan kita bicarakan levelnya Komisi dengan Menteri bukan tanggung jawab Bapak-Ibu berdua. Kalaupun kami paksa Ibu bilang setuju pun ndak bakalan jalan, Bu, ya, jadi kita jangan memaksakan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan melampaui kewenangannya *gituloh*. Oleh karenanya, masing-masing Eselon I, tadi kan kita buang, tapi dengan catatan kita tidak muat angkanya Cipta Karya dan angkanya Perumahan, karena bisa jadi nanti terjadi perubahan seperti yang tadi teman-teman sampaikan. Kalau masing-masing Eselon I, terang saja, Pak Jhonni kita paksa juga tidak bisa mereka Pak, karena menyangkut Direktorat Jenderal lain.

Ini jalan tengah yang saya tawarkan. Saya mau tanggapan dulu dari Bapak dan Ibu, kalau demikian apa bisa disetujui dari Ibu dan Pak Dirjen Perumahan.

KETUA RAPAT:

Dari Anggota dulu, setuju Anggota? Baru kita ke sana.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) - KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya Anggota setuju dong, masa tidak setuju.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Ibu-Bapak setuju? Setuju, Bu? Iya *toh*, setuju. Tidak nyangkut Direktorat Jenderal lain, Pak, ya.

Sudah ketok, Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Empat kali, ya.

F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Pak Roberth, inilah Ketua harus ada di sini, Pak.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Ini pertanyaannya kenapa Pak Lasarus bicara seperti apa yang akan saya bicarakan.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Saya setuju dengan Pak Dewo.

KETUA RAPAT:

Itulah. Pak Lasarus sudah sampaikan ke saya. Saya kalau jadi Menteri, Pak Dewo ini jadi juru bicara saya katanya, itu dia sudah sampaikan itu.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Itu pelecehan namanya.

KETUA RAPAT:

Baik, ya. Pak Dewo, kompor.

Saudara-Saudara yang saya hormati.

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan, maka rangkaian acara RDP pada hari ini telah selesai. Sebelum rangkaian acara rapat hari ini ditutup, saya memberikan kesempatan kepada salah satu Dirjen untuk menyampaikan sambutan akhir atau kata penutup. Silakan.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, Pimpinan sebelum ditutup, setengah menit akan sampaikan kepada Dirjen Cipta Karya. Masih banyak program saya yang belum terakomodir oleh Cipta Karya. Program KOTAKU ada tiga, Program PISEW masih kurang, Program Sanitasi Desa masih kurang, dan itu sudah saya sampaikan secara pribadi kepada Ditjen Cipta Karya. Saya ingatkan sekarang mudah-mudahan itu segera diakomodir.

KETUA RAPAT:

Sudah nanti telepon Ibu saja tidak usah panjang-panjang. Silakan, Bu

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik.

Yang saya hormati, Pimpinan Komisi V DPR RI, dan juga para Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati, serta Pak Dirjen Perumahan beserta jajaran, serta Temen-temen dari Cipta Karya, serta Bapak-Ibu Kabalai yang hadir secara *daring*,

***Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*
Selamat sore, dan
Salam sejahtera untuk kita semuanya,**

Ini merupakan suatu sejarah hari ini kita rapat cukup singkat dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang telah disampaikan Bapak Menteri juga, kita bisa menghasilkan yang terbaik, baik untuk kita semuanya dan untuk Indonesia.

Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan selanjutnya mungkin nanti masih kami laporkan kembali kepada Bapak Menteri. Kami ditunggu Bapak Menteri, Bapak, untuk hal ini segera kami laporkan kepada beliau.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Iya rapatnya singkat tapi *alot*, Bu.

Demikian, Saudara-Saudara rangkaian acara rapat pada hari ini telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat, semoga hal-hal yang telah kita diskusikan dan kita putuskan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita. Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan, maka rapat dengar pendapat pada hari ini dapat kita tutup dengan ucapan terima kasih dan *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB)

JAKARTA, 28 Juni 2022

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002